

---

**IPTeKS PENGENDALIAN INTERN ATAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) PADA KANTOR PELAYANAN SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN (SKCK) POLDA SULUT**

Lusinda Natalya Debora Karo<sup>1</sup>, Christian Datu<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Bahu, Kota Manado, 95115, Indonesia

Email : Lusindakaro@gmail.com

**ABSTRACT**

*The State Budget (APBN) is one thing that is very important for a country because it is a breath for the government in terms of advancing the country. No exception in Indonesia, which is an archipelago with so many regions. The state budget is set every year and carried out for the greatest prosperity of the people. One element of the state budget is the state revenue and grant budget, which is obtained from non-tax state revenues (PNBP). PNBP is a state financial scope that is managed and accounted for so that the Supreme Audit Agency (BPK) as a free and independent audit institution also conducts checks on components that affect state revenues and constitutes state revenues in accordance with the law. PNBP is collected or billed by Government Agencies with an Act or PP order or appointment from the Minister of Finance, based on the PNBP Plan made by the Government Agency Official. One source of Non-Tax State Revenues (PNBP) is obtained in the making of Police Note Certificates (SKCK) that are available throughout the Police of the Republic of Indonesia.*

*Keywords : APBN, PNBP, SKCK, Internal Control*

**1. PENDAHULUAN**

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah salah satu sumber penerimaan negara yang bukan berasal dari pajak karena ini merupakan dana dari masyarakat atas pelayanan yang telah diterima dari instansi pemerintahan. Untuk itu dengan berbagai macam cara pemerintah sedang berupaya meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat untuk mengoptimalkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang akan diterima. Salah satu sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak yaitu melalui kegiatan pelayanan penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang ada diseluruh daerah Kepolisian Republik Indonesia. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) adalah surat dibuat oleh kepolisian yang menjelaskan bahwa pemohon tidak pernah mempunyai kesalahan hukum sehingga pernah dipenjara, ataupun berkelakuan buruk yang mengakibatkan pemohon mempunyai catatan di kepolisian. Dalam penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) terdapat tarif yang akan dibayar oleh pemohon, dimana ini adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang akan diterima negara. Untuk meningkatkan pelayanan tentunya kantor kepolisian yang ada di Sulawesi Utara dalam hal ini Polda Sulut sangat membutuhkan suatu aktivitas pengendalian yang dapat melihat apakah tujuan dari pelayanan sudah tercapai, pengendalian yang diperlukan seperti pengendalian intern . Pengendalian Intern akan membantu berjalannya kegiatan atau pelayanan yang diberikan. Dengan adanya pengendalian intern akan sangat mudah bagi petugas yang ada untuk mengetahui apakah pelayanan sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Pengendalian Intern mampu melihat dan mencegah hal-hal apa saja yang harus dirubah atau ditambahkan dalam pelayanan tersebut.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

**Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).** Markus (2006) “Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah seluruh penerimaan yang diterima negara dari semua aktivitas yang dilakukan instansi pemerintah dalam melaksanakan pelayanan bagi masyarakat“

**Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).** Abhinaya (2012) “SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) Adalah Sebuah Surat atau Alat Bukti Catatan dari Instansi Kepolisian mengenai rekam jejak / riwayat seseorang dalam kurun waktu tertentu menyakup bidang Kriminal yang pada intinya menjelaskan apakah pemohon/masyarakat pernah tersangkut tindak pidana atau tidak, serta didalamnya berisikan identitas Nama, Alamat (sesuai KTP terakhir), Tempat dan Tanggal Lahir, Keperluan dibuatnya SKCK serta Catatan kriminal Pemohon/Masyarakat dari pihak Kepolisian.”

**Pengendalian Intern.** Romney (2015) “Suatu proses yang diterapkan untuk memberikan kepastian bahwa penjagaan atas asset, catatan dan laporan perusahaan telah dilakukan dengan objektif, akurat dan terpercaya guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.”

## 3. METODE DAN TEKNIK PENERAPAN IPTEKS

### 3.1. Metode Penerapan Ipteks

Metode ipteks yang diterapkan disini adalah dengan menggunakan salah satu internal control menurut COSO yakni aktivitas pengendalian (control activities) dengan menguraikan apa saja aktivitas-aktivitas pengendalian intern atas penerimaan negara bukan pajak pada kantor pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Polda Sulut.

### 3.2. Teknik Penerapan Ipteks

Adapun teknik penerapan ipteks yang diterapkan adalah dengan turut serta dalam proses pembuatan SKCK di Polda Sulut. Dengan begitu diimplementasikan dalam aktivitas-aktivitas pengendalian yakni pengendalian pemrosesan informasi, pemisahan tugas, pengendalian fisik, dan telaah kinerja.

## 4. PEMBAHASAN

### 4.1. Gambaran Objek Penerapan Ipteks

Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) adalah Kepolisian yang ada di daerah-daerah di Indonesia dan berada dibawah Kapolri yang tentunya bertugas melaksanakan tugas Polri ditingkat kewilayahan.. Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Utara terdiri dari beberapa Direktorat dimana memiliki fungsi masing-masing dalam pelayanan masyarakat, salah satu Direktorat yang ada di Polda Sulut yaitu Direktorat Intelijen dan Keamanan (Intelkam). Direktorat Intelijen dan Keamanan (Intelkam) adalah Direktorat yang salah satu pelayanannya yaitu penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). SKCK adalah surat keterangan resmi yang dibuat oleh Polri untuk seseorang atau pribadi dimana dalam surat itu menyatakan bahwa pribadi tersebut pernah ataupun tidak pernah terlibat dalam tindak kriminalitas dan pidana. Dalam pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) pemohon akan membayar biaya administrasi dimana itu adalah biaya PNBP yang akan disetorkan ke kas negara. Adapun tarif PNBP yang akan dibayar oleh pemohon sebesar Rp. 30.000 yang diatur dalam PP No. 60 Tahun 2016.

### 4.2. Pembahasan

Agar pengendalian intern atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada kantor pelayanan surat keterangan catatan kepolisian Polda Sulut **berjalan dengan baik hendaknya harus memenuhi aktivitas-aktivitas pengendalian sebagai berikut :**

**Pengendalian Pemrosesan Informasi. Diantaranya terdapat :**

1. Pengendalian umum, adalah suatu standart yang dilakukan oleh pegawai dalam melaksanakan fungsinya atau juga bisa disebut sebagai pengendalian diluar dengan aplikasi komputer. sebagai contoh seluruh pegawai pelayanan kantor Surat Keterangan

Catatan Kepolisian (SKCK) sudah memastikan bahwa ruang kantor terkunci saat meninggalkannya.

2. Pengendalian Aplikasi, adalah sistem pengendalian yang berkaitan dengan komputer. Dimana setiap data yang disimpan dalam satu aplikasi dipisahkan sesuai dengan kebutuhannya pada file-file yang berbeda pula.
3. Otorisasi yang tepat, adalah sejumlah kebijakan atau pemberian kuasa yang diberikan sesuai dengan jabatan dan kedudukan masing-masing individu dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya. Misalnya Direktur menjalankan tugasnya sebagai pimpinan dan Yanmin bertugas dalam melaksanakan Pelayanan Administrasi begitu juga dengan pegawai-pegawai yang ada dalam kantor pelayanan surat keterangan catatan kepolisian Polda Sulut mempunyai tanggungjawabnya masing-masing dan harus dikerjakan sesuai tanggungjawab yang diberikan.
4. Pencatatan dan Dokumentasi. Dalam hal ini semua catatan harus disiapkan dengan cepat dan tepat agar pada saat diperlukan dalam pelaporan semua sudah siap disajikan tepat waktu. Misalnya pengaturan arsip SKCK dalam gudang, maupun pengaturan blanko yang ada. Pencatatan dan dokumentasi yang baik sangat penting agar pengendalian berjalan dengan efektif.
5. Pemeriksaan Independen, adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh orang atau unit lain untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan maupun pelayanan telah berjalan sesuai dengan aturan yang ada, dengan tidak adanya kecurangan maupun hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti dilakukannya wasrit oleh Iswarda setiap bulannya pada kantor pelayanan SKCK Polda Sulut.

**Pemisahan Tugas**, adalah hal yang sangat penting dalam suatu kegiatan maupun sebuah organisasi. Dengan pemisahan tugas pengendalian internal tentunya akan berjalan dengan efektif karena akan mengurangi resiko-resiko yang mungkin terjadi, misalnya kecurangan, manupulasi dan sebagainya. Dalam pengendalian internal sangat disarankan untuk tidak memberikan tanggungjawab yang berlebih atau terlalu banyak kepada satu karyawan maupun pegawai yang ada. Perlu adanya penambahan pegawai dalam pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Polda Sulut karena terkadang ketika pemohon terlalu banyak seperti adanya penerimaan CPNS pelayanan tidak akan berjalan dengan efektif.

**Pengendalian Fisik**, adalah pengendalian yang dilakukan secara langsung dengan melihat bukti fisik yang ada dalam suatu kegiatan maupun organisasi. Pada kantor pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Polda Sulut, Inspektur Pengawas Daerah (Iwarsda) melakukan pemeriksaan langsung pada kantor pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dengan tujuan memeriksa apakah laporan yang disajikan sama dengan sisa blanko yang ada.

**Telaah Kinerja**, adalah dilakukannya evaluasi untuk melihat apakah pelayanan sudah berjalan sesuai dengan tujuan yang ada. Kantor pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Polda Sulut setiap bulannya mengikuti Wasrik yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Utara pada akhir bulan dengan menyajikan laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang ada pada bulan tersebut.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1. Kesimpulan

Pengendalian Intern Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kantor Pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Polda Sulut sudah berjalan dengan cukup baik, namun akan lebih efektif dan efisien apabila aktivitas-aktivitas pengendalian diatas dilakukan dengan tepat dan teliti sesuai dengan prosedur dan aturan yang ada.

## 5.2. Saran

Dalam rangka menambah pendapatan negara melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada kantor pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) perlu adanya pemberitahuan lebih lagi kepada masyarakat/pemohon tentang biaya administrasi yang mereka bayar karena ternyata dalam prakteknya banyak masyarakat yang belum mengetahui untuk apa hal itu. Juga agar seluruh aspek pengendalian internal berjalan lebih efektif perlu adanya penambahan pegawai pada kantor pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Polda Sulut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abinaya Husein (2011). *Pengaruh pemahaman wajib pajak dalam pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)*. Program Studi Manajemen Keuangan. Skripsi. Universitas Bunda Mulia. Jakarta
- Arganata, D. (2016). “*Kualitas Pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di Kantor Pelayanan Masyarakat Satuan Intelijen dan Keamanan Polrestabes Surabaya*”. Ilmu Pemerintahan. Vol. 5, No. 2, Hal. 294-305
- Banuyudi. 2000. *Sistem Pengendalian Internal*. Edisi Pertama. Bandung.
- COSO, 2013, *Internal Control – Integrated Framework* : Executive Summary Durham, North Carolina, May 2013
- Huseng, Rohana. 2008. *Hukum Penerimaan Negara Bukan Pajak Edisi .1* Jakarta: Rajawali Pers.
- Moenir. 2002. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mulyadi, 2001, *Sistem Perencanaan & Pengendalian Manajemen*, Edisi 2, Penerbit Salemba Empat, Jakarta..
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Robert and Vijay. 2005. *Sistem Pengendalian Manajemen*. Edisi Ke-11. Jakarta: Salemba Empat
- Sidjabat, Samuel. 2009. *Pengendalian Internal Terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Melalui Penerapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2002 Pada Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional (BPN)*. Skripsi. Universitas Sumatera Utara.
- Yudistira, 2010. *Analisis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kantor Pertanahan Medan*. Skripsi. Ilmu Ekonomi. Sumatera Utara